

ABSTRAK

Manajemen laba didefinisikan sebagai tindakan non-etis karena memberikan informasi yang menyesatkan pengguna laporan keuangan. Bank syariah seharusnya mengedepankan nilai kejujuran dan etika dalam mengungkapkan laporan entitas perusahaan serta mengutamakan kepentingan seluruh *stakeholders*. Akan tetapi, bank syariah ditemukan melakukan praktik penyimpangan manajemen laba menggunakan diskresi akrual Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari pihak-pihak independen merupakan solusi dalam meminimalisir praktik manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh karakteristik struktur tata kelola perusahaan dari pihak independen terhadap praktik penyimpangan manajemen laba Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis data panel yang diestimasi menggunakan model *fixed effect* dengan metode *seemingly unrelated regression* (SUR). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 12 BUS di Indonesia dengan periode pengamatan tahunan dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Variabel dependen penelitian ini adalah manajemen laba yang diprosikan melalui tingkat absolut diskresioner CKPN, sedangkan variabel independen terdiri dari ukuran DPS, kompetensi DPS, rangkap jabatan DPS, dan komisaris independen. Variabel moderasi yaitu komite audit digunakan untuk mengukur interaksi antara komite audit dengan komisaris independen. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan dan tingkat *earning before tax* (EBT).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi DPS, interaksi komite audit dengan komisaris independen, EBT berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat diskresioner CKPN, sedangkan rangkap jabatan DPS dan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat diskresioner CKPN. Variabel ukuran DPS dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat diskresioner CKPN. Variabel Penelitian ini membuktikan bahwa DPS, komisaris independen, dan komite audit merupakan pihak independen yang mampu mempengaruhi secara serentak dalam mengurangi tingkat diskresioner CKPN bank umum syariah di Indonesia.

Kata kunci: Manajemen Laba, DPS, komisaris independen, komite audit, SUR